

Ringkasan Publik

Persyaratan Pengelolaan Hutan Lestari INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION (IFCC)

Audit Penilikan/Surveillance 3

Tanggal 16-19 February 2021

PT. RIAU INDO AGROPALMA

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau

OLEH

Lembaga Sertifikasi

PT. BUREAU VERITAS INDONESIA



Identitas Lembaga Sertifikasi

1. Nama Perusahaan : **PT. Bureau Veritas Indonesia (BVI)**
2. Nomor Akreditasi : Accredia 243B
3. Alamat : Bureau Veritas Indonesia | **Menara Bidakara 2, 11-12 th floor** | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71 - 73 | Jakarta 12870
www.sea.bureauveritas.com
4. No. Telepon/Fax/Surel : Tel. +62-21 2940 69411
Fax. +62-21 8370 8717
5. Pengelola perusahaan : Manajer Sertifikasi: Fajar Deniswara
Manajer Teknis: Bayu Abirowo
6. Standard : IFCC ST 1001:2014 – Sustainable Forest Management
7. Tim Audit : Pandu Budi Wahono (Lead/Auditor Aspek Sosial)
Achmad Djazuli (Auditor Aspek Produksi)
Ujang Zulkarnaen (Auditor Aspek Ekologi)

Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan : **PT Perawang Sukses Perkasa Industri**
2. Status Hukum : Perseroan Terbatas (PT)
Nomor Induk Berusaha (NIB) No. 8120211140513 tanggal 01 November 2018 diterbitkan Lembaga Pengelolaan dan Penyelenggaraan OSS.
3. Alamat Perusahaan : Jl. Arifin Ahmad No. 03 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai, Pekanbaru, Provinsi Riau.
4. Akte Pendirian : Akta Pendirian Perusahaan Nomor 115 tanggal 20 September 1996. Notaris Refizal SH, berkedudukan di Jakarta.
Akte Terbaru : Akta Perubahan Perseroan No. 10 tanggal 11 November 2020 oleh Notaris Lanawaty Darmadi SH. MM. MKn. yang berkedudukan di Jakarta Pusat. Tersedia Pendaftaran Perubahan Perseroan No. AHU-0189581.AH.01.11. Tahun 2020 tanggal 12 November 2020.
5. SK IUPHHK : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.61/Menhut-II/2006 tanggal 22 Maret 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Tanaman PT. Riau Indo Agropalma atas Areal Hutan Produksi Seluas ±

9.570 Hektar di Provinsi Riau.

- SK IUPHHK Terbaru : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 07 September 2017 tentang Penetapan Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. Riau Indo Agropalma seluas 10.113,91 Hektar di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
6. Luas Konsesi : 10.113,91 Ha
7. Lokasi Konsesi : Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.
8. Wilayah Konsesi :

Longitude	Latitude
102°55'00"-103°10'00" BT	00°01'00"-00°07'00" LU
9. Sistem Silvikultur : Tebang habis dan regenerasi permudaan buatan
10. Species : *Acacia crassicarpa*
11. Director : Bpk. Sarmin
12. Wakil Pengelola (MR) : Bpk. Sarmin

Ringkasan Hasil Audit Unit Pengelolaan Hutan

Ruang Lingkup Sertifikasi

Pengelolaan Hutan Lestari dengan total area seluas 8.106,65 Ha dari luas konsesi 10.113,91 Ha, dengan spesies *Acacia crassicarpa*, lokasi di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau.

Rencana Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Kerja Usaha (RKUPHHK-HTI) Periode 2017-2026 seluas 10.113,91 ha yang mengacu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6063/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019, terdiri dari:

1. Kawasan Perlindungan Setempat dan Kawasan Lindung Lainnya (KPSKLL) = 1.102,63 Ha (10,90%).
 - a. Sempadan Sungai = 258,02 Ha (2,55%)
 - b. KPPN = 209,02 Ha (2,07%)
 - c. KPSL = 317,76 Ha (3,14%)
 - d. Areal Lindung Gambut = 317,83 Ha (3,14%)
 - e. Puncak Kubah Gambut = -
2. Tanaman Pokok = 6.759,62 Ha (66,83%)
3. Tanaman Kehidupan = 2.040,66 Ha (20,18%)
- Jumlah = 9.902,91 Ha (97,91%)

APL	= 211,00 Ha (2,09%)
Jumlah Total	= 10.113,91 Ha (100,00%)

Type Unit Pengelolaan Hutan

Perusahaan mengelola Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan species *Acacia crassicarpa* yang merupakan jenis paling cocok pada kondisi tanah yang ada.

Produk Cakupan Sertifikasi

Kayu bulat spesies *Acacia crassicarpa* untuk produksi bubur kertas (pulp).

Konsultasi Pemangku Kepentingan

Tidak ada concern/perhatian dari pemangku kepentingan lain yang diterima sebelum pelaksanaan audit.

Persyaratan Umum

Legalitas perizinan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti legalitas perizinan yang masih valid di tahun 2021, dengan tersedia Akte Pendirian Perusahaan, Akte Perubahan Perseroan, Nomor Induk Berusaha.

Sebagai Perusahaan di bidang Kehutanan, sudah ditunjukkan legalitas perizinan dengan tersedia Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.468/Menlhk/Setjen/PLA.2/9/2017 tanggal 07 September 2017 tentang Penetapan Areal Kerja, Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.6063/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019 tentang Revisi RKUPHHK-HTI Periode Tahun 2017-2026, Keputusan Direktur Utama PT. Riau Indo Agropalma No. SK.13/RIA/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 tentang Revisi RKTUPHHK-HTI Tahun 2020, Keputusan Direktur Utama PT. Riau Indo Agropalma No. SK.08/RIA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Rencana RKTUPHHK-HTI Tahun 2021.

Kewajiban keuangan dan pendanaan

Perusahaan sudah menunjukkan bukti membayar semua kewajiban finansial dan perpajakan kepada pemerintah dengan tersedia dokumen pembayaran PPh Pasal 21 Tahun 2020, PPN Tahun 2020, pembayaran PBB Tahun 2020, pembayaran PSDH Tahun 2020-2021. Perusahaan juga sudah menunjukkan Laporan Audit Keuangan Tahun Berakhir 31 Desember 2019 dan 2018, Perjanjian Jual Beli Kayu Tahun 2021 dan Rencana Biaya Pembangunan HTI tahun 2021.

Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari

Tersedia hasil penilaian II Kinerja PHPL yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi PT Equality Indonesia. Kegiatan Penilaian II yang dilaksanakan dengan skema audit jarak jauh

(remote audit) pada tanggal 5 s/d 9 Oktober 2020. Hasil penilaian kinerja PHPL dinyatakan lulus.

Visi Misi dan Kebijakan

Perusahaan sudah memiliki Visi Misi tertulis Tahun 2020, dan sudah membuktikan mengkomunikasikan kepada Karyawan dan Kontraktor di tahun 2020, sedangkan kepada Masyarakat terkendala karena pandemi Covid-19.

Struktur organisasi dan tenaga kerja

Perusahaan sudah dapat menunjukkan memiliki Struktur Organisasi yang ditetapkan Direktur Utama tanggal 02 Januari 2021. Sudah diverifikasi sample job description/uraian tugas posisi jabatan dalam Struktur Organisasi Perusahaan. Jumlah tenaga kerja perusahaan sebanyak 46 orang. Jumlah tenaga kerja Kontraktor sebanyak 173 orang dari 4 Perusahaan Kontraktor.

Penetapan Management Representative (MR)

Tersedia Surat Penunjukan Management Representatif dari Direktur Utama tanggal 01 Februari 2021 tentang Penetapan MR (Management Representative) Bpk Sarmin yang juga merupakan Direktur Utama.

Pelatihan kompetensi

Perusahaan sudah menunjukkan mempertahankan dan meningkatkan kompetensi pekerja, melalui pelatihan, dengan bukti dokumen - Rekapitulasi Realisasi Training Tahun 2020, terdiri dari 13 jenis kegiatan dengan realisasi karyawan 92 orang dan pekerja kontraktor 36 orang.

Prosedur terdokumentasi

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Prosedur Terdokumentasi, sesuai dengan skala dan intensitas operasional pengelolaan hutan yang ditetapkan dalam List Standart Operating Procedure (SOP) s/d Tahun 2021, sebanyak 140 SOP, dan Instruksi Kerja sebanyak 101 WI.

Sarana Prasarana

Perusahaan sudah merencanakan dan menetapkan infrastruktur yang memadai dalam pengelolaan hutan dengan sudah dibangun Jalan Utama sepanjang 10,2 km, Jalan Cabang sepanjang 2 km, Kanal Primer sepanjang 19,066 km, Kanal Sekunder 6,229 km, dan Kanal Tersier 171,290 km. Perusahaan juga sudah memenuhi sarana prasarana lain berupa Bangunan Kantor, Mess Pekerja, Guest House, Pergudangan, Pos Pantau, Pos Faktur, Logpond, Pos P3K, Rumah Ibadah, Sarana Olah Raga, dan Transportasi Kerja berupa Kendaraan Roda 2 dan Roda 4.

Penelitian dan Pengembangan

Perusahaan sudah menunjukkan dokumen R&D yang masih sama dengan audit Tahun 2020.

Rencana Kelola

Perusahaan sudah menunjukan memiliki Rencana Kelola Jangka Panjang RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 No. SK.6063/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2019 tanggal 28 Juni 2019. Perusahaan sudah menyusun Rencana Kegiatan Tahunan RKTUPHHK-HTI Tahun 2021 No. SK.08/RIA/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Monitoring dan Evaluasi

Perusahaan sudah menunjukan melakukan monitoring dan evaluasi untuk kegiatan operasional pembangunan HTI berupa monitoring dan evaluasi aspek produksi, ekologi dan sosial dalam RKT, kegiatan pengukuran plot sample permanen (PSP), Laporan Hasil Produksi (LHP), Laporan RKL-RPL dan Laporan program CD-CSR (PMDH).

Ringkasan Publik

Perusahaan belum menunjukan Ringkasan Publik Tahun 2021 dan Ringkasan Monitoring dan Evaluasi Tahun 2020.

Aspek Produksi

Manajemen Hutan

Perusahaan sudah mengatur areal hutannya melalui penyusunan tata ruang HTI, dan dalam rangka menjaga areal hutannya, perusahaan telah melaksanakan tata batas temu gelang dan telah memperoleh penetapan areal kerja (pengukuhan) berdasarkan Kepmen LHK tanggal 7 September 2017 seluas 10.193,91 ha di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Selain itu perusahaan memiliki Instruksi Kerja Patroli Pengamanan Hutan, sebagaimana laporan patrol harian security bulan Januari 2021.

Untuk tahun kegiatan 2020-2021 perusahaan belum dapat menyampaikan bukti pelaksanaan inventarisasi hutan berkala terhadap tanamannya (plantation assessment). Tersedia inventarisasi hutan sebelum panen (PHI-Pre harvesting Inventory) yang dilakukan dalam rangka penyusunan RKT 2020 dan RKT 2020.

Perusahaan sudah menerapkan prinsip-prinsip SFM sebagaimana dimuat dalam dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 (Bab III).

Perusahaan memiliki mekanisme optimalisasi penggunaan sumberdaya hutan (kayu) melalui pelaksanaan SOP Harvesting Excellent (Havex) sebagai alat untuk menilai hasil kinerja kontraktor oleh distrik (*wood loss, wood residue, stump height*).

Berdasarkan informasi perusahaan, pada tahun 2020 tidak dapat dilakukan kegiatan rehabilitasi pada areal terdegradasi akibat adanya konflik manusia dengan harimau.

Kelestarian Hutan

Perusahaan sudah melaksanakan kegiatan pengukuran riap pada PSP. Disampaikan PSP Yied Report Tahun 2019 (jenis ACRA) dan Rencana Tahun 2020.

Perusahaan tidak melaksanakan kegiatan produksi tahun 2020 akibat adanya konflik

manusia dengan satwaliar (Harimau Sumatera). Untuk tahun kegiatan 2021 telah dilakukan pemanenan pada areal seluas 250,80 ha dengan produksi kayu 33.964, 68 m³. Luas panen masih dibawah AAC yang ditetapkan yaitu 2.845,55 ha; 386.740,57 m³. Dan riap hasil hitung proses produksi masih di bawah riap proyeksi panen pada Revisi RKUPHHK-HTI Periode 2017-2026 sebesar 37,58 m³/ha/tahun.

Perusahaan menyampaikan selama kegiatan RKT 2020 tidak ada kegiatan pemanfaatan HHBK akibat adanya konflik manusia dengan harimau. Terdapat Laporan Monitoring HHBK dengan hasil Nihil.

Konversi Hutan Alam

Pada tahun 2020-2021 tidak ada konversi hutan alam yang dilakukan perusahaan.

Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak

Untuk mengetahui rangkaian kegiatan Sistem Ketelusuran Kayu/Lacak Balak (CoC) sejak dari petak tebang sampai dengan pengangkutan sudah dapat diverifikasi dilakukan sesuai ketentuan dengan tersedia dokumen pada Simpul Lokasi Tebang: LHC atau PHI; pada Simpul TPn: label tumpukan, Buku ukur dan LHP, SP (tidak diperoleh LMK, dokumen SIPNBP); pada Simpul TPK Hutan/Pos Faktur Hutan: SP Antara dan e-SKSHHK; pada Simpul TPK Antara/Pos Faktur: e-SKSHHK yang dimatikan, e-SKSHHK Lanjutan dan lampirannya, DKB, administrasi kapal, namun tidak ada LMK Antara.

Aspek Ekologi

Pengelolaan Fungsi Ekosistem dan Hidrologis Hutan

Perusahaan sudah menetapkan dampak dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman industri yang berdampak penting baik yang tertera dalam dokumen RKL-RPL dan dokumen RKU (Penurunan kualitas udara, Penurunan kualitas air sungai, Gangguan biota Air, Kebakaran hutan dan lahan, Subsiden di areal PWH dan Blok tebang, Keamanan hutan, Hama dan penyakit dan penurunan biodiversity, Adanya limbah B3).

Perusahaan memiliki prosedur-prosedur dalam kegiatan RIL (*reduce impact logging*), yang telah mengacu kepada pedoman nasional, telah mempertimbangkan tipe ekosistem lahan basah/gambut beserta sistem hidrologisnya dan telah memperhatikan hasil-hasil penilaian dampak lingkungan dalam dokumen AMDAL dan RKL-RPL.

Sesuai dokumen Revisi RKL-RPL Tahun 2019, tidak terdapat areal perlindungan untuk tujuan perlindungan terhadap tanah karena kelerengan sangat curam atau jenis tanah yang sangat peka terhadap erosi. Kelerengan areal kerja PT. RIA merupakan kelas kelerengan A (landai), serta seluruh jenis tanah tergolong tanah organosol (gambut). Areal yang diperuntukkan untuk tujuan perlindungan seluas 1.102,63 Ha atau 10,9% dari luas keseluruhan. Merupakan areal perlindungan sempadan sungai seluas 258,02 Ha, KPPN seluas 209,02 Ha, KPSL seluas 317,76 Ha dan areal lindung gambut seluas 317,83 Ha.

Dalam Laporan RKL-RPL Semester I tahun 2020, pemantauan dampak negatif kegiatan-kegiatan pengelolaan hutan adalah: water table dan subsideni gambut, sifat fisik dan kimia tanah, hidrologi dan tata air serta pencemaran air permukaan serta pencemaran tanah. Parameter sifat fisik tanah yang dipantau adalah kelembaban tanah karena tanah gambut

merupakan tanah hemik atau tanah yang tengah mengalami proses dekomposisi. Parameter sifat kimia tanah yang dipantau mengacu pada PP 7 tahun 1983 untuk kesuburan tanah dan parameter pada PP 150 tahun 2000 untuk mengetahui degradasi tanah. Pemantauan water table mengikuti pemantauan yang diplotkan sesuai PROPER (Pemerintah), hasil pemantauan water table di 11 titik pemantauan bervariasi antara -42,45 cm hingga -33,51 cm dari permukaan tanah.

Pengelolaan limbah B3 oleh PT. RIA praktis berdasarkan Izin operasional/komersial melalui OSS yang terbit tanggal 1 November 2018 sifatnya sementara. Terdapat Laporan Pelaksanaan Realisasi Kegiatan Penyimpanan Limbah B3 semester I-IV tahun 2020. Didalamnya berisi Kegiatan Sosialisasi dan Neraca Limbah B3 di TPS Limbah B3. Terdapat Kontrak Pengangkutan Limbah B3 tanggal 6 Februari 2018. Antara PT. RIA (penghasil), PT. Ranggam Karimun Jaya (pengangkut) dan PT. Desa Air Cargo Batam (pemanfaatan), berlaku hingga 2 tahun hingga 5 Februari 2020. Terdapat Perjanjian Pengangkutan Limbah B3 tanggal 15 Januari 2020. Antara PT. RIA (penghasil), PT. Global Marindo Perkasa (pengangkut) dan PT. Desa Air Cargo Batam (pemanfaatan), berlaku hingga 31 Desember 2021.

Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

Pemantauan keberadaan flora dan fauna dengan berbagai kategori konservasi dilakukan setiap semester melalui kegiatan pemantauan biodiversity di areal kawasan lindung. Sebagai bukti kegiatan, telah diterima data thalysheet pemantauan biodiversity pada areal KPSL, Kawasan Lindung Gambut dan Windbreak.

Terdapat beberapa flora penting dengan berbagai kategori konservasi diantaranya kantong semar (dilindungi), Prepat (VU/IUCN), Meranti (CR/IUCN) dan Ramin (VU/IUCN). Untuk kategori satwa liar, terdapat lebih banyak jenis dilindungi dan atau masuk kedalam status konservasi penting berdasarkan IUCN dan CITES. Sebanyak 21 jenis satwa liar (mamalia, burung dan reptile) memiliki kategori konservasi penting diantaranya Harimau, Rusa, kera ekor Panjang, beruang madu, tupai kijang, landak, kancil, trenggiling, owa, elang rawa, rangkok, dan elang hutan. Pemantauan satwa liar tidak hanya pada jalur biodiversity, namun dilakukan melalui pencatatan perjumpaan di seluruh areal kerja PT. RIA.

Kegiatan rehabilitasi kawasan lindung dengan rencana seluas 20 Ha di KPPN belum dapat dilakukan karena terkendala pandemic Covid-19. Manajemen PT. RIA telah menyiapkan Permohonan Tender tanggal 1 Agustus 2020.

Jenis species kunci yang masih ditemukan di areal kerja PT. RIA adalah Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*). Dalam hal mitigasi dampak negatif terhadap manusia PT. RIA telah memiliki prosedur SOP Pengelolaan Harimau di Areal Konsesi Perusahaan. Mengenai keberadaan harimau sumatera di areal PT. RIA sudah dirasakan mengganggu kegiatan operasional pengelolaan. Pada tahun 2019 sudah terjadi dua kali insiden kecelakaan kerja akibat binatang buas harimau, yaitu pada tanggal 23 Mei 2019 yang memakan korban satu orang meninggal dunia dari kru terbang, serta pada tanggal 24 Oktober 2019 yang mengakibatkan korban meninggal dunia hingga akhirnya PT. RIA mengentikan kegiatan lapangan mulai tanggal sejak 25 Oktober 2019 hingga 19 Juni 2020.

Berdasarkan peta tata ruang Revisi RKU (2019), PT RIA sudah memberikan ruang yang representative dari ekosistem alami dalam lansekap. Ruang tersebut terdiri dari sempadan sungai seluas 258,02 Ha, KPPN seluas 209,02 Ha, KPSL seluas 317,76 Ha dan areal lindung

gambut seluas 317,83 Ha. Disamping itu masih terdapat areal tanaman kehidupan seluas 2.040,66 Ha yang sebagian besar bervegetasi alami.

Tersedia Perjanjian Jual Beli Benih tanggal 1 Januari 2016 antara PT. Arara Abadi dan PT. RIA, dimana dalam salah satu isi perjanjian tersebut terdapat klausul PT. Arara Abadi menjamin bahwa setiap benih merupakan benih Non-GMO (Non-Genetically Modified Organism).

Perlindungan Hutan

Perusahaan sudah memiliki prosedur yang lengkap berkaitan dengan identifikasi, pemantauan dan Langkah penanganan terhadap gangguan diantaranya SOP Perlindungan Hutan, WI Patroli penagamanan hutan, WI Penanganan perambah hutan, SOP Pengendalian kebakaran hutan dan lahan, WI Pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

Perusahaan sudah memiliki satu regu inti (15 orang) yang bertugas untuk memantau potensi kebakaran, melakukan checking lapangan serta siaga dalam menanggulangi atau pemadaman kebakaran di seluruh areal kerja dan areal sekitarnya. Sarana dan prasarana yang dimiliki sudah memenuhi standar yang telah dibebankan oleh pemerintah. Dibidang keamanan hutan, PT. RIA bekerjasama dengan PT. Delta Garda Persada untuk melakukan kegiatan pengamanan meliputi ancaman kebakaran hutan, ancaman perburuan satwa, ancaman illegal logging serta melakukan tindakan pengamanan di kawasan lindung dilakukan dengan patroli harian.

Pemantauan hama dan penyakit dilakukan secara rutin yang meliputi seluruh kelas umur tanaman akasia di lapangan. Aspek yang diidentifikasi adalah jenis serangan dan jasad pengganggu yang muncul baik pada bagian daun, batang maupun sistem perakaran tanaman. Jenis hama yang teridentifikasi diantaranya adalah: rayap *Coptotermes curvignathus*, hama Jangkrik, *helopeltis sp*, Kumbang *Ambrosia Xylosandrus sp*. Menurut penjelasan manajemen, serangan hama di lapangan dan di persemaian belum pada tahap yang merugikan secara ekonomi sehingga penanggulangan hama terpadu melalui rekayasa agen biologis belum dilakukan.

Pembatasan akses public kedalam areal kerja PT. RIA dilakukan di batas areal. Terdapat pos jaga dan personil security dari PT. Delta Garda Persada yang bersiaga selama 24 Jam. Hal ini dilakukan untuk melindungi hak kepemilikan, fasilitas dan infrastruktur, perlindungan kesehatan dan keselamatan, perlindungan terhadap kegiatan tanpa ijin dan perambahan hutan, perlindungan terhadap kebakaran, atau untuk tujuan konservasi. Selain dibatas areal, penempatan pos jaga juga dilakukan di areal basecamp dan logpond.

Aspek Sosial

Hak pemanfaatan atas sumberdaya hutan oleh masyarakat

Perusahaan sudah memiliki Kebijakan Kelestarian Sosial ditetapkan tanggal 02 November 2020 ditandatangani Direktur Utama. Dalam kebijakan tercantum antara lain: Mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat local dan masyarakat adat, Melaksanakan program-program pemberdayaan masyarakat, Menyelesaikan konflik dan keluhan secara bertanggungjawab dan tanpa kekerasan, Menjaga harmonisasi hubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan demi kelancaran operasional. Terdapat beberapa desa yang berada di sekitar konsesi perusahaan diantaranya: Desa Tanjung Simpang, Teluk Bunian,

Pelangiran, Mandah dan Sungai Guntung.

Perusahaan sudah menunjukkan membuat dan melaksanakan kesepakatan dengan masyarakat, sebagaimana tersedia bukti dokumen: Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan antara PT. RIA dengan H Mustamin di Desa Tanjung Simpang, Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan antara PT. RIA dengan Kelompok Tani Ramin Desa Tanjung Simpang, Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan antara PT. RIA dengan Kelompok Tani Pelangiran Raya Desa Tanjung Simpang, Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan antara PT. RIA dengan Kelompok Tani Berkat Saudara Desa Tanjung Simpang, Perjanjian Kerjasama Hutan Tanaman Pola Kemitraan antara PT. RIA dengan Kelompok Tani Meranti Desa Tanjung Simpang. Pada tahun 2020 tidak ada perkembangan kegiatan untuk pembagian hasil (fee) dan pembinaan kerjasama dengan masyarakat, karena adanya penghentian kegiatan operasional perusahaan akibat kasus adanya konflik dengan Harimau Sumatra.

Perusahaan memiliki prosedur mekanisme resolusi konflik yang berkaitan dengan hak masyarakat, antara lain SOP Penyelesaian Konflik Lahan, dan SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal. Perusahaan sudah menunjukkan membuat Laporan Pemetaan Potensi dan Resolusi Konflik tanggal 14 Juli 2020 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau. Dalam laporan terlampir daftar areal konflik dalam IUPHHK-HTI PT. RIA sebanyak 9 kasus dengan luas 1.289,5 Ha.

Hubungan yang harmonis dan berkelanjutan antara UM dan masyarakat

Perusahaan belum memiliki Dokumen SIA terbaru sebagai perbaikan Dokumen SIA Tahun 2014 yang disusun oleh Pusat Studi Agribisnis dan Sumber Daya Fakultas Pertanian Universitas Islam Riau.

Perusahaan sudah menunjukkan memberikan prioritas kepada masyarakat memperoleh kesempatan kerja, dengan tersedia karyawan dan pekerja yang berasal dari Masyarakat Lokal (Kabupaten Indragiri Hilir), sample: PT. RIA Tahun 2021 sebanyak 7%, kontraktor PT. Delta Tahun 2021 sebanyak 30%, dan pekerja kontraktor PT. KJ Nursery Tahun 2021 sebanyak 54%.

Perusahaan sudah menunjukkan melaksanakan program CD-CSR Tahun 2020, dengan total biaya Rp. 343.041.100,-, terdiri dari Peningkatan SDM meliputi subsidi pendidikan, beasiswa, honor guru, ketrampilan, perlengkapan belajar mengajar, Peningkatan perekonomian dengan pengembangan sentra produksi pertanian, perikanan, peternakan dan wiraswasta di desa-desa sekitar konsesi sesuai potensi desa, Pembinaan sosial budaya meliputi pelayanan kesehatan, kegiatan sosial masyarakat, dan peralatan olah raga, Kegiatan keagamaan meliputi penerangan rumah ibadah, hari raya keagamaan, dan partisipasi pembangunan tempat ibadah, Pembangunan infrastruktur meliputi partisipasi pembangunan sarana dan prasarana desa. Tersedia bukti perusahaan sudah membuat Laporan CD-CSR Tahun 2020 kepada Pemerintah tanggal 05 Januari 2021. Perusahaan sudah menunjukkan menyusun rencana program PMDH (CD-CSR) Tahun 2021 dengan penyebaran lokasi program di 4 Desa, dengan anggaran biaya sebesar Rp. 218.000.000,-.

Perusahaan belum melaksanakan komunikasi dan konsultasi FPIC dengan masyarakat di tahun 2020 untuk sosialisasi terpadu RKT 2021 (Visi Misi, Tata Batas Konsesi, Tata Ruang, NKT, RKT, Kawasan Lindung, Karhutla dan Program CD-CSR), mengingat izin pelaksanaan ditunda berdasarkan Surat Camat Pelangiran tanggal 15 Desember 2020 karena pandemi

Covid-19, sampai dengan adanya informasi lanjutan dari Tim Gugus Tugas Kecamatan

Pemenuhan hak-hak Pekerja

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan Prinsip-Prinsip Dasar Pekerja ditandatangani Direktur Utama. Tercantum menjamin pemenuhan konvensi ILO yang sudah diratifikasi Pemerintah RI, yaitu ILO No. 29, ILO No. 87, ILO No. 105, ILO No. 98, ILO No. 98, ILO No. 138, ILO No. 182.

Perusahaan memiliki prosedur penanganan keluhan kesah karyawan, berupa SOP Penanganan Keluh Kesah dan Konseling Pekerja. Tersedia dokumen Rekapitulasi Pengaduan dan Keluh Kesah Karyawan Tahun 2020/2021 melalui kotak saran dan pengaduan, dengan Nihil Pengaduan.

Perusahaan sudah menunjukkan membayar upah sesuai dengan upah minimum yang ditetapkan, dengan ditunjukkan slip gaji karyawan dengan level terendah tahun 2021 sebesar Rp. 3.081.146,-/bulan, dan untuk pekerja kontraktor sebesar Rp. 137.000,-/Hari Kerja.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Serikat Pekerja PUK SP-MAR Distrik PT. RIA Masa Bakti 2017-2020, dan pencatatan berdasarkan Surat Keputusan Disnakertrans tanggal 15 Mei 2018. Perusahaan sudah menunjukkan Berita Acara Pembentukan LKS Bipartit Periode 2020-2023 pada tanggal 04 Agustus 2020. Perusahaan sudah menunjukkan Buku PKB PT. RIA Tahun 2020-2022 tanggal 29 Mei 2020, dimana Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama PT. RIA, masa berlaku Juni 2020 s/d Juni 2022 disahkan Kepala Disnakertrans Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 10 Juni 2020.

Perusahaan sudah menunjukkan Daftar Karyawan PT. RIA Tahun 2021, dimana penyebaran data karyawan sebagai berikut: Berdasar Domisili 7% Lokal dan 93% Non Lokal, Berdasarkan Jenis Kelamin 100% Laki-Laki dan 0% Perempuan, Berdasarkan Pendidikan 17% Sarjana, 9% Diploma, 72% SLTA dan 2% SMP, Berdasarkan Agama 83% Islam, Katolik 15% dan 14% Kristen, Berdasarkan Suku merata Jawa, Batak, Minang, Sunda, Melayu.

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki prosedur terkait jenjang karir dan penilaian kinerja, dan menunjukkan bukti pelaksanaan penilaian kinerja karyawan tahun 2020.

Perusahaan sudah menunjukkan tidak melibatkan penggunaan pekerja anak dan memiliki prosedur rekrutment dan seleksi yang mensyaratkan usia 18 tahun, dengan diverifikasi usia termuda dari Karyawan PT. RIA usia 23 tahun lahir tanggal 10 Agustus 1998, Pekerja kontraktor PT. KDCF (Harvesting) usia 18 tahun 8 bulan lahir tanggal 29 Juni 2002, Pekerja kontraktor PT. Delta (Pengamanan) usia 18 tahun 8 bulan lahir tanggal 27 Juni 2002, dan Pekerja kontraktor PT. KJ (Nursery) usia 18 tahun 9 bulan lahir tanggal 10 April 2002.

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)

Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Kebijakan K3 dan prosedur Identifikasi Bahaya, Penilaian dan Pengendalian Resiko. Sudah dapat ditunjukkan tersedia dokumen Identifikasi Bahaya, Penilaian & Pengendalian Resiko Tahun 2021. Perusahaan sudah menunjukkan dokumen Monthly Accident/Incident Report Periode 2020 Nihil Kecelakaan Kerja.

Perusahaan memiliki system/prosedur K3 dan pemeliharaan kesehatan pekerja, dan menunjukkan laporan distribusi APD, kotak P3K, APAR, laporan pemeriksaan pekerja kontraktor tahun 2020 dan laporan pemeliharaan kesehatan karyawan (MCU) tahun 2019. Perusahaan menunjukkan email tentang penghentian sementara pelaksanaan MCU di RS Eka

Hospital Pekanbaru tanggal 18 Maret 2020, sehingga karyawan PT. RIA belum dapat melakukan pemeriksaan Kesehatan berkala setahun sekali. Perusahaan menunjukkan pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan petugas yang terkena paparan bahan kimia untuk 7 orang (2 orang petugas logistic, 2 orang petugas supplychain dan 3 orang petugas logistic nursery). Perusahaan juga sudah menunjukkan melakukan pengawasan kepesertaan BPJS TK dan BPJS KES tenaga kerja kontraktor di tahun 2020 melalui bukti pembayaran kepesertaan BPJS.

Perusahaan sudah melaksanakan pelatihan K3 untuk karyawan dan pekerja kontraktor tahun 2020 dengan ditunjukan Matrik Training Lingkungan & K3 Karyawan dan Kontraktor Tahun 2020. Perusahaan sudah menunjukkan memiliki Lisensi K3 untuk SIO Operator pekerja kontraktor PT. ACUA.

Perusahaan sudah menyediakan fasilitas air minum, MCK (mandi, cuci, kakus) yang bersih, untuk digunakan oleh semua pekerja dan menyediakan mess bagi karyawan dan pekerja secara layak dan memadai (akomodasi tempat tidur, penerangan, air bersih, dan tempat sampah di setiap bangunan mess).

Perusahaan sudah menunjukkan menyusun Rencana Kerja K3 Tahun 2021 sebanyak 22 kegiatan, diantaranya HSE Award, HSE Meeting, HSE Briefing, HSE School Program, Inspeksi APD, Inspeksi Kotak P3K, Management Field Visit, Laporan Penanganan dan Pencegahan Covid-19, Pemeriksaan Kesehatan, Laporan Pos P3K, dll. Tersedia Laporan Hasil Internal Audit Integrasi HSE PT. RIA (ISO 14001:2015 dan ISO 45001:2018) tanggal 05 Agustus 2020, terdapat 3 temuan Minor.

Perusahaan sudah menunjukkan Surat Keputusan Kadisnakertrans Provinsi Riau tanggal 12 Oktober 2020 tentang Pengesahan Organisasi P2K3 PT. RIA. Tersedia rencana budget 2020 untuk perpanjangan SKP dan Linsensi K3 Umum An. Zulfitriah (AK3 Umum PT. RIA) yang juga sebagai Ahli K3 Umum PT. RIA, namun tertunda karena adanya pandemic Covid-19. Tersedia Laporan Triwulan P2K3 kepada Pemerintah untuk Laporan Triwula I Tahun 2020, Laporan Triwulan II Tahun 2020, dan Laporan Triwulan III Tahun 2020.

Verifikasi Penutupan Temuan Audit Sebelumnya

Sudah dilakukan verifikasi dalam menutup temuan ketidaksesuaian hasil audit penilikan 2. Detail hasil verifikasi progress penutupan ketidaksesuaian oleh Team Auditor pada audit penilikan 2 disampaikan dalam laporan, dimana ada 2 temuan ketidaksesuaian hasil audit penilikan 2 yang bersifat interim closed/ditutup sementara sampai ditunjukan bukti penyelesaian.

RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT

Temuan: Terdapat 4 temuan ketidaksesuaian NC Minor yang harus dibuat usulan tindakan perbaikan langsung (correction) dan usulan tindakan perbaikan sistematis (corrective action) dalam jangka waktu 3 bulan yang selanjutnya akan diverifikasi efektifitas penutupannya pada saat penilikan/surveillance audit berikutnya.

No	Persyaratan Standar IFCC	Ketidaksesuaian	Waktu Penutupan
1	2.4 ; 3.3	Perusahaan belum menunjukkan dokumen ringkasan public tahun 2021 yang mencantumkan rencana kerja tahunan pengelolaan hutan dan monitoring evaluasi tahun sebelumnya.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
2	3.2 ; 5.2	Belum dapat ditunjukkan dokumen bukti pencatatan dan monitoring pertumbuhan tegakan pada PSP dan riap hutan oleh Perusahaan selama periode 2020-2021.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
3	11.1	Perusahaan memiliki prosedur penyampaian dan penyelesaian keluhan kesah, namun belum dapat menunjukkan memiliki buku pencatatan/register keluhan kesah karyawan.	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut
4	11.4	Perusahaan belum menunjukkan pelaporan program LKS Bipartit setiap 6 bulan sekali kepada Disnaker (Permenaker No. Per.32/2008).	Sebelum tenggat waktu 12 bulan pada Audit Berikut

Rekomendasi Sertifikasi: Merekomendasi untuk dapat mempertahankan sertifikat setelah penyelesaian/penutupan NC Minor sebelum tenggat waktu 12 bulan yang diverifikasi pada audit penilikan/surveillance berikutnya.